

**PELAKSANAAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR YAYASAN
PENDIDIKAN TINGGI DI KOTA PADANG (DITINJAU DARI PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG YAYASAN)**

Afifah Puspa Sari¹ Busyira Azheri² Ulfanora³

ABSTRAK

Penelitian Mengenai Pelaksanaan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi Di Kota Padang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi di Kota Padang dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari Yayasan Pendidikan Tinggi di Kota Padang yang belum melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasannya ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Pelaksanaan Peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap pendirian dan status hukum yayasan pendidikan tinggi, dan juga menjadi kontro bagi yayasan dalam menjalankan roda usahanya, sehingga tidak menyimpang dari maksud dan tujuan pendiriannya. Berkaitan dengan penelitian yang diajukan dalam hal tersebut, metode pendekatan yang digunakan dalam hal tersebut adalah *yuridis sosiologis*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum yang dilengkapi dengan penelitian kepustakaan. Digunakan teknik komunikasi langsung dengan berupa pedoman wawancara tak berstruktur (*Unstructured interview*). Analisa data dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara *deskriptif*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa, pada teori badan hukum, yayasan dikatakan sebagai badan hukum apabila telah mendapatkan pengesahan dari Menteri. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 71 Undang-Undang Yayasan, bahwa yayasan yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar hingga batas waktu yang ditentukan maka tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya. Faktanya masih banyak yayasan yang belum melakukan penyesuaian, namun sanksi belum dapat diterapkan karena batas waktu belum berakhir. Sedangkan akibat hukum bagi yayasan yang belum menyesuaikan selain tidak boleh menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya juga yayasan tersebut harus dilikuidasi kekayaannya serta menyerahkan hasil likuidasi sesuai dengan pasal 68 Undang-Undang Yayasan, serta berdasarkan teori Tanggung Jawab mengatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu. Dalam hal ini yayasan yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar dianggap lalai dalam melaksanakan undang-undang atau peraturan yang menjadi landasan hukum suatu negara, maka yayasan tersebut dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kata Kunci: Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan, Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013.

¹ Mahasiswa Megister Kenotariatan Universitas Andalas, Padang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

**PELAKSANAAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR YAYASAN
PENDIDIKAN TINGGI DI KOTA PADANG (DITINJAU DARI PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-
UNDANG YAYASAN)**

Afifah Puspa Sari¹ Busyira Azheri² Ulfanora³

ABSTRAK

Research on the Implementation of Adjustment Articles of Association of Higher Education in the city of Padang is based on Government Regulation No. 2 of 2013 , aims to determine how the implementation of the adjustment of the Articles of Association of Higher Education Foundation in Padang and to know how the legal consequences of Higher Education Foundation in Padang are not mlakukan His foundation Statutes adjustment in terms of Government Regulation No. 2 of 2013 . Implementation of the Regulation is expected to provide legal certainty to the establishment and legal status of higher education foundations , and also became controversial for the foundation in running their business , so it does not deviate from the intent and purpose of its establishment . In connection with the proposed research in terms of the approach used in sociological terms is juridical . Data collection techniques in the field of research is associated with the rules of law which is equipped with library research . Direct communication with the techniques used in the form of unstructured interview guides (Unstructured interviews) . Data analysis was done qualitatively and presented descriptively . Based on the research conducted it could be concluded that , on the theory of legal entities , the foundation said as a legal entity if it has been approved by the Minister . It is also stated in Article 71 of Law Foundation , a foundation that does not make adjustments to the base budget to the limit specified time then can not use the word " foundation " in front of his name . In fact there are many foundations that have not made the adjustment , but sanctions can not be applied because the time limit has not expired . While the legal consequences that have not adapted to the foundation in addition to not use the word " foundation " in front of the name is also the foundation must be liquidated his fortune and submit the results of liquidation in accordance with article 68 of Law Foundation , as well as based on the theory of Responsibility says that a person legally responsible above a certain act . In this case the foundation did not adjust the base budget is considered negligent in implementing legislation or regulations that form the basis of a state law , then the foundation can be said to have committed an unlawful act , which must be legally defensible .

Keywords : Redefining the Articles of Association , Higher Education , Government Regulation No. 2 of 2013.

¹ Mahasiswa Megister Kenotariatan Universitas Andalas, Padang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang